

### **BAB III**

#### **SEJARAH KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM**

##### **A. Awal Mula Terbentuknya Kesultanan Palembang Darussalam**

Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya menempatkan wilayah Palembang dalam bayang-bayang ancaman pusat-pusat kekuasaan politik lain di sekitarnya yang lebih kuat. Selama beberapa abad pusat-pusat kekuasaan politik di Jawa secara bergantian berusaha menempatkan Palembang sebagai wilayah bawahannya. Upaya-upaya untuk melepaskan diri dari hegemoni kerajaan-kerajaan di Jawa memunculkan respons berupa pengiriman ekspedisi-ekspedisi militer kerajaan Jawa ke Palembang. Ekspedisi militer berlangsung berulang-kali, misalnya terjadi pada tahun 1275 pada masa Kertanegara berkuasa di Singasari, tahun 1350 dan 1397 pada masa Kerajaan Majapahit.<sup>1</sup>

Pada masa akhir Kerajaan Majapahit, penguasaan wilayah Palembang berada di tangan Ario Dillah atau yang juga sering disebut dengan nama Ario Damar (1455-1486). Dia adalah salah seorang keturunan Prabu Brawijaya V yang bertahta di Majapahit. Ario Dillah dengan demikian bertindak sebagai wakil penguasa Majapahit di Palembang. Ario Dillah mendapat hadiah Putri Champa, istri Prabu Brawijaya yang menganut Islam. Pada saat dihadiahkan kepada Ario Dillah, Putri tengah dalam keadaan hamil. Anak tersebut setelah lahir dinamai Raden Fatah, yang nantinya menjadi pendiri Kesultanan Demak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal.113

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 3-5

Setelah melewati masa kecil di Palembang, tatkala menanjak dewasa Raden Fatah pergi ke Majapahit bersama dengan Raden Kusen, saudaranya. Keduanya lantas membuka pemukiman di Desa Bintoro, yang menjadi cikal-bakal Kesultanan Demak. Atas dukungan Sunan Ampel, yang juga mertuanya, Raden Fatah mengangkat diri sebagai Sultan Demak. Kekuatan militer Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa terus tumbuh dengan pesat sehingga akhirnya mampu menaklukan Kerajaan Majapahit. Dengan dimasukkannya Majapahit di bawah kekuasaan Kesultanan Demak, Raden Fatah kemudian bergelar Senopati Jimbun Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panata Gama. Gelar ini sekaligus menegaskan betapa pentingnya Palembang bagi penguasa Demak yang pertama itu. Sebagai wakil Kesultanan Demak di Palembang adalah Pati Unus, anak sultan sendiri. Dia dikirim ke Palembang pada tahun 1528 untuk menggantikan Ario Dillah yang meninggal dunia.<sup>3</sup>

Kemelut perebutan kekuasaan di Demak antara Hadiwijaya dan Arya Penangsang berakhir dengan kemenangan Hadiwijaya. Setelah memenangkan perebutan kekuasaan, Hadiwijaya kemudian mendirikan Kerajaan Pajang. Sebagian pengikut Arya Penangsang yang tidak mau menyerah memutuskan untuk menyingkir ke Palembang di bawah pimpinan Ki Gede ing Suro, yang kemudian menjadi penguasa Palembang dari tahun 1587 hingga 1604. Dia digantikan oleh Ki Mas Dipati, yang memerintah Palembang pada kurun waktu 1604-1609.<sup>4</sup> Pada periode 1609-1627 Kesultanan Palembang diperintah oleh Made ing Suko (1609-

---

<sup>3</sup> Kiagus Imron Mahmud, *Sejarah Palembang*. (Palembang: Penerbit Anggrek, 2008), hal.36

<sup>4</sup> Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, hal. 138,147

1627), yang diteruskan oleh pemerintahan Pangeran Madi Alit (1627- 1629), Pangeran Seda ing Pura (1629-1636), Pangeran Seda ing Kenayan (1936-1650), serta Ratu Sinuhun atau Pangeran Seda Ing Pasarean (1651-1552), dan Pangeran Seda ing Rejek (1652-1659).<sup>5</sup>

Pada masa pemerintahan Pangeran Seda ing Rejek, Palembang berusaha menjalin hubungan dengan Mataram. Hal ini dilakukan seiring dengan munculnya kesulitan-kesulitan sehubungan dengan kehadiran VOC di Palembang. Sejak tahun 1655 VOC telah menempatkan perwakilan dagang di Palembang dengan menunjuk Anthonij Boeij. Tindakan-tindakan Boeij khususnya penahanan jung Cina dan perampasan lada yang dimuat, serta pembakaran kapal di Pulau Kembaro telah menyulut amarah Pangeran Seda ing Rejek. Meskipun Boeij kemudian digantikan oleh Cornelis Ockersz, ketidakharmonisan hubungan antara VOC dan penguasa Palembang tidak mereda. Kunjungan Ockersz yang kedua dengan Kapal Jacatra pada tanggal 25 Juni 1658 menyulut terjadinya bentrokan dan tembak-menembak akibat tindakan Ockertsz menahan beberapa kapal, termasuk salah satunya milik putera mahkota Mataram.<sup>6</sup> Situasi yang memanas memang telah dicoba diredakan melalui perdamaian, namun hal ini tampaknya hanya terjadi di permukaan. Dendam dan amarah ternyata belum menghilang, terbukti pada tanggal 22 Agustus 1658 Kapal Jacatra dan De Watcher diserbu. Ockertsz dan para pengikutnya terbunuh,

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 147.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 179-181

jumlahnya mencapai 42 orang, sedangkan 28 orang lainnya disandera, dan sisanya sebanyak 24 orang meloloskan diri ke Jambi.<sup>7</sup>

Akibat insiden tersebut, VOC menyerbu dan membakar Keraton Kuto Gawang. Pembakaran dilakukan pasukan Belanda di bawah pimpinan Laksamana John van der Laen dan John Truytman terjadi pada 24 November 1659.<sup>8</sup> Serbuan dan pembakaran dimaksudkan Belanda sebagai tindakan membalas dendam atas serangan yang dilakukan terhadap dua kapal yacht Belanda, Jacatra dan Watchman, serta pembunuhan atas semua awak kapalnya. Ekspedisi militer Belanda melibatkan sejumlah kapal, termasuk Orange sebagai kapal komando, ditopang dengan kapal Postilion, Molucco, Arms of Batavia, dan Charles. Di samping itu, terdapat pula tiga kapal galleots, yakni Appletree, Hour Batavia, dan Hammebiel. Serbuan mengikutsertakan pula kapal-kapal chalooops, yakni Crab, Tronk, dan Flying Dear, dengan 600 awak pelaut dan 700 tentara darat. Dalam perjalanan di Sungai Musi, armada berjumpa dengan kapal-kapal yacht, Bloemendahl, Koukerk, dan Cat, dua kapal chalooop lainnya, Cony dan Koelong.<sup>9</sup>

Penguasa Kesultanan Palembang dan pasukannya berusaha keras melakukan perlawanan. Pertahanan ditambah dengan membuat benteng dari tanah di tepi Sungai Musi dan hilir Pulau Kembaro, untuk memperkuat benteng yang sudah ada, yakni Benteng Bamagangan, Benteng Martapura dan Benteng Menapura. Benteng-benteng tersebut dilengkapi dengan senjata meriam. Pada

---

<sup>7</sup> *Ibid* hal.182

<sup>8</sup> Nanang S. Soetadji, *Kesultanan Palembang*, (Palembang: Pemerintah Kotamadya Palembang, 1996), hal.9

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.64-65

Benteng Pulau Kembaro dipasang 14 buah meriam, sedangkan pada Benteng Bamagangan diperkuat dengan 24 buah meriam. Sementara itu, Benteng Menapura diperkuat dengan 9 buah). Di sepanjang sungai di antara benteng-benteng dipasang tonggaktonggak berlapis, sebagian tongggak melintang di tengah sungai dimana di pasang rakit-rakit dengan bahan yang mudah terbakar untuk menghancurkan kapal-kapal lawan.<sup>10</sup>

Meledaknya Benteng Bamagangan tanpa diketahui sebabnya telah meruntuhkan moral prajurit Palembang, ditambah lagi dengan meledaknya granat-granat tangan yang menimbulkan kebakaran pada rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Ancaman kobaran api dan pasukan Belanda memaksa pasukan Palembang mengundurkan diri. Hal ini menciptakan keleluasaan bagi Belanda untuk membakar ludes seluruh kota dan Keraton Kuta Gawang pada 24 November 1659. Dari peperangan dengan Palembang ini, pasukan Belanda menyita 75 buah meriam berukuran besar, 150 meriam berukuran kecil terbuat dari bahan perunggu, dan 295 bedil laras panjang, serta sejumlah amunisi. Serangan ini pula telah membuat Pangeran Seda ing Rejek terpaksa meninggalkan istananya, melarikan diri ke daerah Indralaya selama beberapa tahun hingga meninggal dunia di Sakatiga.<sup>11</sup>

## **B. Masa Kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam**

Berangkat dari puing-puing kehancuran, Ki Mas Hindi berusaha bangkit dan membangun kembali Kesultanan Palembang. Mempertimbangkan posisinya yang masih lemah, Ki Mas Hindi mengambil sikap moderat baik terhadap Belanda

---

<sup>10</sup> Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, hal.90

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.188

maupun Mataram. Untuk mendapatkan dukungan Mataram, Ki Mas Hindi mengirim utusan ke Mataram beberapa kali meskipun disambut dengan dingin oleh penguasa Mataram. Jalan moderat juga diambil dalam hubungan dengan Belanda. Beberapa kontrak dengan Belanda disepakati dengan harapan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam kontrak tahun 1662, misalnya, Belanda diijinkan oleh pihak kesultanan untuk membangun loji di Sungai Alur, berseberangan dengan Keraton Palembang yang dipindahkan dari lokasi lama ke Beringin Janggut.<sup>12</sup>

Setelah posisinya lebih kuat, Ki Mas Hindi mengangkat diri sebagai penguasa Palembang Darussalam dengan bergelar Sultan Abdurrahman. Gelar ini dipakainya sejak tahun 1675 dan hal ini menunjukkan keinginannya untuk menyamai Sultan Agung dari Mataram yang mendapatkan gelarnya dari penguasa Mekah pada 1641.<sup>13</sup> Pemakaian gelar “*Sultan*” ini meletakkan sebuah tradisi baru di lingkungan Keraton Palembang karena gelar-gelar yang dipakai oleh para penguasa sebelumnya adalah Ki Gede, Tumenggung, Pangeran, dan Pangeran Tumenggung.<sup>14</sup> Gelar-gelar lama yang lebih sederhana ini semula dimaksudkan agar tidak melampaui gelar tertinggi yang berlaku di Mataram. Perubahan yang terjadi dengan pemakaian gelar sultan oleh Ki Mas Hindi dan bahkan kemudian gelar susuhunan atau sunan setelah menyerahkan tahta kepada pewarisnya secara eksplisit menunjukkan keinginannya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.191-193

<sup>13</sup> Nanang S. Soetadji, *Kesultanan Palembang*, hal.10

<sup>14</sup> Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, hal 196.

dan keterikatan ideologis maupun politis dengan Kerajaan Mataram di Tanah Jawa.<sup>15</sup>

Bahkan lebih jauh lagi, guna menandingi kebesaran sultan Mataram, Sultan Abdurrahman memaklumkan diri sebagai pemimpin umat Islam dengan bergelar Kholifatul Mukminin Sayyidul Imam. Hal ini sekaligus berarti bahwa agama Islam menjadi agama resmi Kesultanan Palembang Darussalam. Masa pemerintahan Sultan Abdurrahman relatif tenang dan panjang, yakni berlangsung dari tahun 1662 sampai 1706.<sup>16</sup> Pada masa bawah pemerintahannya, ajaran-ajaran Islam mulai meresap dan menjadi acuan dasar dalam penataan struktur Kesultanan Palembang Darussalam, termasuk dalam sistem peradilan yang didasarkan pada Al-qur'an. Melalui perkawinan politik dengan seorang putri dari penguasa Bangka, Sultan Abdurrahman akhirnya mendapatkan warisan Kepulauan Bangka.<sup>17</sup> Masa pemerintahan Sultan Abdurrahman yang relatif tenang dan berlangsung lebih dari 40 tahun membawa Palembang pada kemajuan dan kemakmuran yang semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat kesultanan.<sup>18</sup>

Palembang menjadi ibukota Kasultanan Palembang Darussalam dari tahun 1553 hingga 1814.<sup>19</sup> Masa kejayaan Kesultanan Palembang berlangsung pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa kejayaannya ini Palembang tampil sebagai poros penting dalam jaringan perdagangan di perairan Malaka dan pantai utara Jawa.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 1996 hal.37

<sup>16</sup> Nanang S. Soetadji, *Kesultanan Palembang*, hal.38-39

<sup>17</sup> Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, hal.169

<sup>18</sup> Nanang S. Soetadji, *Kesultanan Palembang*, hal. 10

<sup>19</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hal.28

Penulis Inggris, Marsden, menggambarkan pelabuhan Palembang merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Banyak kapal berkunjung di pelabuhan ini, dari Jawa, Madura, Bali dan Sulawesi. Beragam komoditas dagang dibawa oleh kapal-kapal tersebut masuk ke Palembang seperti beras, garam, dan bahan pakaian. Orang-orang Belanda mengumpulkan lada dan timah dari Palembang sesuai dengan kontrak antara VOC dengan Sultan Palembang. Pengangkutan lada dan timah dari Palembang masing-masing kurang lebih mencapai 2 juta pon.<sup>20</sup>

Palembang sekaligus muncul sebagai kawasan yang dinamis dalam perkembangan Islam. Beberapa ulama besar bereputasi internasional muncul dari Palembang, di antaranya yang paling menonjol adalah Syeikh Abdussomad al-Palimbani, seorang ulama keturunan Arab dengan pengaruh besar di Keraton Palembang dan Dunia Melayu.<sup>21</sup> Syeikh Abdussomad al-Palimbani aktif mengembangkan agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803). Dia menerjemahkan karyanya yang berjudul *Sair al-Salikin* dan *Hidayat al-Salikin*. Karya-karyanya ini masih banyak mendapat apresiasi dan dibaca hingga dewasa ini di negara-negara Asia Tenggara terutama di Filipina Selatan, Thailand Selatan, Brunai, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Selain itu, Al-Palimbani juga dipandang berjasa dalam menginspirasi semangat patriotisme dan perlawanan melawan penjajah lewat korespondensi yang dijalinnya

---

<sup>20</sup> William Marsden, *Sejarah Sumatra* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hal.330

<sup>21</sup> Jumhari, *Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab, dan Cina Di Palembang: Dari Masa Kesultanan Palembang Hingga Reformasi*, (Padang: BPSNT Padang Press, 2010), hal.5-6

dengan Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta dan Pangeran Mangkunegara di Surakarta.<sup>22</sup>

Tokoh-tokoh ulama besar Palembang lainnya yang berperan penting sebagai penasehat sultan, misalnya Kyai Haji Kiagus Khotib Komad pada masa Sultan Abdurrahman dan Tuan Fakih Jamaluddin pada masa Sultan Muhammad Mansyur.<sup>23</sup> Kiagus Khotib Komad adalah seorang ahli tafsir Alquran dan Fiqih, sedangkan Tuan Fakih Jalaludin mengajar ilmu Alquran dan ilmu Ushuluddin. Ulama ini memainkan peran penting dalam kegiatan dakwah hingga masa pemerintahan Sultan Mahmud Jayo Wikramo.<sup>24</sup> Kaum ulama memang mempunyai kedudukan istimewa dalam Kesultanan Palembang Darussalam. Tempat pemakaman para ulama yang berdekatan dengan makam sultan memberikan bukti tentang kedudukan istimewa kaum ulama dalam di Keraton Palembang.<sup>25</sup>

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I Kota Palembang dibangun menjadi sebuah kota modern. Upaya ini dilakukan dengan melakukan penataan kampung-kampung dan jalan-jalan. Sultan Mahmud Badaruddin I juga meletakkan pembangunan bangunan-bangunan monumental Palembang abad ke-18, termasuk diantaranya Bangunan Kuto Lamo dan Kuto Besak pada tahun 1737, serta bangunan Masjid Agung Palembang.<sup>26</sup> Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I, VOC memaksakan kontrak monopoli dalam perdagangan

---

<sup>22</sup> Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI-XVII*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995), hal.48-49

<sup>23</sup> Kiagus Imron Mahmud, *Sejarah Palembang*, hal.104-105

<sup>24</sup> Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI-XVII*, hal.48

<sup>25</sup> Kiagus Imron Mahmud, *Sejarah Palembang*, hal.104-105

<sup>26</sup> Nanang S. Soetadji, *Kesultanan Palembang*, hal. 10-11

lada dan timah dari Kesultanan Palembang. Dengan pemberlakuan hak monopoli ini, para pedagang non-Belanda khususnya Inggris dan Portugis tertutup peluangnya untuk terlibat dalam perdagangan komoditas tersebut.<sup>27</sup> Pemberian hak monopoli kepada 39 VOC merupakan bentuk kompromi taktis yang dilakukan untuk melonggarkan tekanan dari VOC, sehingga Sultan Mahmud Badaruddin I mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mempersatukan keluarga kesultanan yang terpecah-belah.<sup>28</sup>

Keberadaan Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pusat politik menjadi lebih kuat tatkala di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin (1774-1803). Selama memegang tampuk kekuasaan, Sultan Muhammad Bahauddin I berhasil membangun armada laut untuk mengamankan perdagangan maritim di jalur Selat Malaka dan menegakkan kekuasaan Palembang atas Bangka dan Belitung. Sultan juga membangun benteng pertahanan di Muntok, serta melanjutkan pembangunan Kuto Besak yang telah diawali oleh kakeknya, Sultan Mahmud Badaruddin I. Capaian lainnya adalah diselesaikannya sengketa perbatasan dengan Lampung dan kerawanan-kerawanan yang sering terjadi wilayah lalu lintas perdagangan dan penanaman lada. Kekayaan dan kemakmuran Palembang tambah meningkat berkat aktivitas perdagangan yang dilakukannya dengan pedagang-pedagang asing lain. Bukan itu saja, di bawah Sultan Muhammad Bahauddin, Kesultanan Palembang menjadi pusat sastra agama Islam yang terkemuka di Nusantara berkat pengembangan syiar Islam melalui sastra Melayu,

---

<sup>27</sup> Kiagus Imron Mahmud, *Sejarah Palembang*, hal. 48

<sup>28</sup> Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), hal. 2

dan mengambil-alih peran yang sebelumnya dimainkan oleh Aceh yang tengah mengalami kemerosotan.<sup>29</sup>

Setelah Sultan Muhammad Bahauddin meninggal dunia, kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam diserahkan kepada puteranya yang bernama Pangeran Ratu yang kemudian bergelar Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin II. Sultan yang pada masa kecilnya bernama Raden Hasan ini dinobatkan sebagai sultan pada tahun 1803 Masehi (1218 H) dan pada tahun 1819 juga memakai gelar Kholifatul Mukminin.<sup>30</sup>

Sultan Mahmud Badaruddin II dikenal sebagai figur penguasa Palembang yang mempunyai keunggulan menonjol. Seorang penulis Belanda, W.L. de Sturler melukiskan Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai “seorang pemimpin yang memiliki kepribadian yang kuat, ksatria, pemberani, jantan, cepat bertindak, cekatan, memanfaatkan waktu yang tepat, teguh pendirian”.<sup>31</sup> Mahmud Badaruddin II dari Palembang ini juga digambarkan sebagai seorang penguasa yang pandai dalam berdiplomasi, cerdas dan berwibawa, terdidik dan ahli dalam strategi perang. Badaruddin II juga diakui sebagai seorang organisator yang sangat ulung, serta ahli sastra yang produktif. Kualitas yang dimiliki dalam bidang sastra tampak dari karya-karya yang dihasilkannya, misalnya Hikayat Martalaya, Syair Nuri, Pantun Sultan Badaruddin, dan Syair Perang Menteng.<sup>32</sup> Menurut Drewes, Syair Nuri dan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.110- 111

<sup>30</sup> Husein Nato Dirajo, *Riwayat Hidup Sultan Mahmud Badarrudin II*, (Palembang: 1984), hal.1

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 3

<sup>32</sup> Kiagus Imron Mahmud, *Sejarah Palembang*, hal. 55

Pantun ditulis oleh Sultan Mahmud Badaruddin II ketika menjalani kehidupan di tempat pengasingannya di Ternate.<sup>33</sup>

### C. Raja- Raja Kesultanan Palembang Darussalam

Berikut Daftar Raja-raja yang pernah berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam:<sup>34</sup>

No	Nama Raja	Periode
1.	Ario Dillah/Ario Damar	1455-1486
2.	Pangeran Sedo Ing Lautan	? - 1528
3.	Ki Gede ing Suro Tuo	1528-1545
4.	Ki Gede ing Suro Mudo	1546-1575
5.	Ki Mas Adipati	1575-1587
6.	Pangeran Madi ing Angsoko	1588-1623
7.	Pangeran Madi Alit	1623-1624
8.	Pangeran Seda in Pura	1624-1630
9.	Pangeran Seda ing Kenayan	1630-1642
10.	Pangeran Seda Ing Pasarean	1642-1643
11.	Pangeran Mangkurat Seda ing Rejek	1643-1659
12.	Kiai Mas Hindi (Sultan Abdurrahman)	1662-1706
13.	Sultan Muhammad (Ratu) Mansyur Jayo ing Lago	1706-1718
14.	Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno	1718-1727

<sup>33</sup> Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hal. 95

<sup>34</sup> Nanang S. Soetadji, *Kesultanan Palembang*, hal.27-30

15.	Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo	1727-1756
16.	Sultan Ahmad Najamuddin I	1756-1774
17.	Sultan Muhammad Bahauddin	1774-1803
18.	Sultan Mahmud Badaruddin II	1803-1821
19.	Sultan Husin Dhiauddin/ Sultan Ahmad Najamuddin II (adik Mahmud Badaruddin II)	1812-1813
20.	Sultan Ahmad Najamuddin III (putra Mahmud Badaruddin II)	1819-1821
21.	Sultan Ahmad Najamuddin IV (putra Sultan Ahmad Najamuddin II)	1821-1823

#### **D. Masa Keruntuhan Kesultanan Palembang Darussalam**

Masa berakhirnya Kesultanan Palembang tidak terpisahkan dari keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Badaruddin II untuk menghentikan perlawanannya. Dengan kekuatan militer yang sangat besar di bawah pimpinan Jenderal Mayor Hendrik Markus Baron De Kock. Belanda mencoba membalas kekealahannya dan berusaha mengakhiri perlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II. Pengerahan kekuatan militer secara besar-besaran tidak menjamin penaklukan Palembang berlangsung dengan mudah karena pihak Kesultanan Palembang juga telah mempersiapkan diri dengan memperkuat benteng pertahanan, persenjataan, maupun komando dan personelnnya.<sup>35</sup>

Ketegangan antara kedua belah pihak mulai meningkat sejak 9 Juni 1821. Kontak-kontak senjata dan pertempuran yang pecah pada pada hari-hari berikutnya memperlihatkan Palembang tidak mudah ditundukkan, bahkan Belanda berada di

---

<sup>35</sup>Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, hal.127-129

posisi yang sulit karena banyak jatuh korban di pihaknya. 43 Pihak Belanda pun kemudian menggunakan muslihat berupa serangan mendadak pada hari Minggu. Hal ini tidak diduga oleh pihak Palembang akan dilakukan pihak Belanda mengingat adanya kesepakatan penghentian pertempuran pada hari Jumat dan Minggu sebagai bentuk penghormatan kedua belah pihak. Dengan menggunakan muslihat ini dan upaya habishabisan, pasukan Belanda akhirnya berhasil menguasai Benteng Manguntama dan mengunci posisi Palembang. Peringatan pun dilayangkan Belanda kepada Sultan Mahmud Badaruddin II dengan pilihan menghentikan perlawanan atau menghadapi pembumihangusan keraton, Kota Palembang dan rakyatnya.<sup>36</sup>

Dihadapkan pada pilihan yang dilematis tersebut, akhirnya Sultan Mahmud Badaruddin II menerima pilihan berkorban demi keselamatan rakyatnya. Pilihan ini membuatnya harus menyerahkan kekuasaan kepada keponakannya, Prabu Anom (Sultan Najamuddin IV) dan ayahnya, Husin Dhiauddin (Susuhunan Ahmad Najamuddin II), serta menerima hukuman berupa pengasingan dirinya di Ternate pada tahun 1821, dan menjalani hidup jauh dari rakyat dan para pendukungnya. Dalam masa pengasingannya, Sultan Mahmud Badaruddin II diikuti oleh keempat istrinya, yakni Ratu Anom Kosima, Mas Ayu Ratu Ulu, Mas Ayu Ratu Ilir, dan Ratu Alit. Sultan Badaruddin II meninggal di Ternate pada 26 November 1852

---

<sup>36</sup> Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, hal. 144-145

setelah kurang lebih selama 32 tahun hidup di pengasingan dan dimakamkan di Ternate.<sup>37</sup>

Pada tahun 1864 pemerintah kolonial memulangkan sebanyak 18 putera-puteri Sultan Mahmud Badaruddin II dari Ternate ke Palembang. Mereka yang dipulangkan di antaranya adalah Pangeran Prabu Wijayo Husin, Pangeran Prabu Menggalo Umar, Pangeran Prabu Wikramo Abdurrahman, Pangeran Prabu Nato Menggalo, Pangeran Kesumo Syekh, Pangeran Kesumo Dimekayo Hanan, Pangeran Suto Wijayo Usman, Pangeran Suto Kramo Akil, dan Pangeran Putra Dinato Ali.<sup>38</sup> Pemulangan mereka bukan berarti berakhirnya tindakan pengasingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda terhadap keturunan Sultan Mahmud Badaruddin II dan para pengikutnya yang setia.

Sikap anti Belanda yang terus mereka tunjukkan di Palembang dengan penggalangan rencana perlawanan membuat Residen Tobias memerintahkan kembali penangkapan sejumlah keturunan Sultan Mahmud Badaruddin II. Selanjutnya, mereka dibuang ke berbagai tempat di Hindia Belanda. Raden Haji Syarif Abdullah, misalnya, dibuang ke Tondano, sedangkan Raden Muhammad Munzir, Raden Hasan, Raden Muhammad Amin, Raden Muhsin, Raden Manan dibuang ke Manado. Sebagian lainnya dibuang ke Ternate diantaranya Raden Abdul Karim, Raden Abdul Majid, Raden Nangcik, Raden Muhammad Akib, Raden Hasan, Raden Muhammad Ali, Raden Adnan, dan Raden Husin diasingkan ke Ternate. Raden Muhammad Napis, Raden Abdurrahman, Raden Nak, Raden

---

<sup>37</sup> Husein Nato Dirajo, *Riwayat Hidup Sultan Mahmud Badarrudin II*, hal.6

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.6

Muhammad Mansur, dan Raden Amja dibuang ke Ambon. Ada pula keturunan sultan Palembang dan pengikutnya yang dibuang ke Kupang dan Rote.<sup>39</sup> Pembuangan-pembuangan tersebut menjadi faktor yang menjelaskan luasnya penyebaran orang-orang Palembang dan keturunan penguasa Kesultanan Palembang Darussalam khususnya Sultan Mahmud Badaruddin II di berbagai wilayah Hindia Belanda, dan keberadaan penyebaran mereka masih dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia hingga dewasa ini.

Selain berpengaruh terhadap keluarga kesultanan, penaklukan militer Belanda atas Kesultanan Palembang Darussalam mempunyai pengaruh besar terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat Palembang. Secara politis Kesultanan Palembang Darussalam dihapus keberadaannya pada tahun 1824 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Penghapusan ini dilakukan menyusul kekalahan Sultan Mahmud Badarudin II dalam perlawanannya terhadap kekuatan militer Belanda. Dengan dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam, bekas wilayahnya kemudian diintegrasikan ke dalam kekuasaan kolonial.

Kebijakan kolonial atas Palembang diletakkan oleh J.J. van Sevenhoven, yang bertindak sebagai penasehat Residen Belanda di Palembang. Kebijakan yang diperkenalkannya adalah sistem pemerintahan langsung atas Palembang yang sangat pragmatis sifatnya. Dalam sistem ini setiap daerah Palembang yang berhasil dikuasai Belanda diserahkan pengendaliannya kepada komandan militer, yang berkewajiban mengusahakan dengan cara apapun untuk mendapatkan kesediaan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal.8

pemimpin-pemimpin pribumi bekerja sama. Para pemimpin pribumi ini berfungsi sebagai pendamping komandan militer Belanda dalam menjalankan roda pemerintahan. Misalnya Residen Militer Kota Palembang, J.C. Rinjst, dalam menjalankan pemerintahan kolonial didampingi oleh Pangeran Kramajaya, menantu Sultan Mahmud Badaruddin II, yang berperan sebagai perdana menteri. Meskipun kekuasaan politiknya bersifat semu, keberadaan pendamping pribumi menjadi sarana penting bagi Belanda untuk meningkatkan legitimasi kekuasaannya di mata penduduk pribumi Palembang.<sup>40</sup>

Pemerintah Kolonial Belanda membagi bekas wilayah Kesultanan Palembang Darussalam menjadi dua bagian, yakni Karesidenan Palembang dan Karesidenan Bangka-Belitung.<sup>41</sup> Pembentukan Karesidenan Palembang dilakukan pada 1 Juni 1824. Karesidenan ini dibatasi mulai dari laut melewati Sungai Mesuji hingga Matawolu dengan garis berkelak-kelok hingga mata air Danau Seroja. Garis tersebut berlanjut melalui Gunung Pungkau, Bukit Mandah dan Pematang Tigaman menuju Bukit Pasagi.<sup>42</sup>

Secara administratif Karesidenan Palembang dibagi menjadi beberapa afdeling dengan masing-masing dipimpin oleh asisten residen. Secara terperinci wilayah Karesidenan Palembang terdiri dari empat afdeling, yakni:

- 1) Daerah Ibukota Palembang
- 2) Afdeling Palembang Ilir, dengan Sekayu sebagai ibukota

---

<sup>40</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*, hal. 48

<sup>41</sup> Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 42

<sup>42</sup> *Ibid*, 2013:44

- 3) Afdeling Palembang Ulu, dengan Lahat sebagai ibukota dan
- 4) Afdeling Ogan Ulu dan Komering, dengan ibukota Baturaja.<sup>43</sup>

Wilayah *afdeling* dibagi-bagi menjadi beberapa *onderafdeling*, yakni wilayah administratif yang dikepalai oleh seorang kontrolir. Dalam menjalankan tugasnya, seorang kontrolir dibantu oleh beberapa demang atau kepala distrik, asisten demang, mantri polisi, mantri pajak dan mantri kesehatan. Pemberlakuan administrasi kolonial menandai integrasi wilayah dan masyarakat Palembang dalam era kekuasaan imperialis Belanda.

---

<sup>43</sup>*Ibid*, 2013:44-45